

**FUNGSI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MENURUT PASAL 42
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 PADA PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

***FUNCTION OF DISTRICT SELECTION PANITIES ACCORDING TO ARTICLE 42
LAW NUMBER 15 OF 2011 ON THE ELECTION PRESIDENT AND
REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF 2014***

¹Hasbar, ²Muh. Akbar, ³Asnawi Salman

^{1,2,3}*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email : hasbar.ucunk2@gmail.com)

(Email : Akbar.akbar090@gmail.com)

(Email : asnawi.hukumsalman@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk Untuk mengetahui peranan PPK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di kecamatan Bolano dan ntuk mengetahui faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di kecamatan Bolano. Metode penelitia ini yaitu menggunakan metode penelitian Normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah Dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014, PPK memiliki peran penting sebagai ujung tombak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan karena PPK bersentuhan langsung dengan masyarakat, dalam praktiknya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, PPK memiliki peran yaitu meningkatkan akurasi pemutakhiran data pemilih presiden dan wakil presiden serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong dan Ketika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya hal ini dikarenakan beberapa yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pemilu, kurangnya anggaran, kurangnya edukasi politik kepada masyarakat, fanatisme terhadap vigur calon presiden serta jauhnya jarak Tempat pemungutan suara (TPS).

Kata Kunci : PPK, presiden, wakil presiden

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the role of KDP in increasing public participation in the 2014 presidential and vice presidential election in Bolano sub-district and to find out the factors that led to a low level of public participation in 2014 presidential and vice presidential elections in Bolano sub-district. This research method is to use Normative research methods. The results of this study are: In terms of increasing community participation in the election of the President and Vice President in 2014, KDP has an important role as the spearhead to increase community participation in elections because KDP has direct contact with the community, in practice to increase community participation, KDP has a role namely increasing the accuracy of updating the president and vice president's voter data and conducting socialization to the public in the Bolano sub-district, Parigi Moutong Regency and when the election of the President and Vice-President was held on July 9, 2014 there were still many people who did not use their voting rights. public

awareness about elections, lack of budget, lack of political education to the public, fanaticism towards the presidential candidate and the distance of polling stations (TPS).

Keywords : PPK, President, vice president

PENDAHULUAN

Dalam praktik demokrasi di belahan dunia manapun, suara rakyat menjadi elemen mendasar dalam pelaksanaan sebuah pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) yang bebas, jujur dan adil. Maraknya kembali minat pada prinsip dan prosedur pemerintahan demokratis yang menyentuh akar kehidupan masyarakat bisa dipandang sebagai suatu langkah kembali ke dasar teori dan praktik demokrasi itu sendiri. Peran serta langsung masyarakat sesungguhnya adalah dasar bagi terpeliharanya kehidupan bermasyarakat yang baik.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli Tahun 2014, di mana sistem pemilihan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Dari regulasi ini merupakan dasar pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan selama 5 tahun sekali dengan cara dipilih secara “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh rakyat sebab Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis sangat dibutuhkan sebuah lembaga negara yang menjadi penyelenggara pemilu. Penyelenggara yang dimaksud terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU), Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disingkat BAWASLU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk “memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjelaskan bahwa PPK dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu “membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap, dan harus mampu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat. Terkait dengan sosialisasi tersebut

PPK telah berperan untuk selalu memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemilu itu sendiri.

Dalam tataran praktis di Indonesia tidak terkecuali di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif tahun 2014 sebagaimana data yang dirilis oleh KPU Daerah Parigi Moutong yang mana jumlah DPT sebanyak 11.295 orang sementara jumlah pengguna hak pilih sebanyak 8.570 orang, dengan demikian jumlah angka golput sebanyak 2.725 orang. Angka golput ini relatif lebih sedikit dibanding dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang jarak waktu pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan dua bulan setelah dilaksanakannya pemilu legislatif, dapat kita lihat di mana jumlah DPT sebanyak 11.369 orang, sementara yang menggunakan hak pilihnya hanya mencapai 8.379 orang, dengan demikian yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.990 orang. Jika dibandingkan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif tahun 2014 dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 legislatif dapat dikatakan sangat rendah, artinya jumlah angka golput pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden meningkat dari jumlah 2.725 menjadi 2.990 orang .

Bertolak dari uraian dalam latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini sebagai berikut : 1). Bagaimana peranan PPK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di kecamatan Bolano ? 2). Faktor apakah yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di kecamatan Bolano?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan tanpa melalui perantara baik menggunakan metode wawancara maupun menyebarkan kuisioner kepada responden yang telah ditetapkan. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong karena menurut penulis lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan data kajian terhadap objek penelitian, sehingga penulis menganggap lokasi itulah yang paling tepat; Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Anggota PPK Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong dan masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya atau Golput; dan Sampel dalam penelitian ini adalah sebahagian diambil secara proporsional sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dengan demikian jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang dijadikan informan. Teknik penentuan sampel yaitu *non-random sampling* atau non acak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang menguraikan secara kualitatif temuan penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik ini menggunakan beberapa cara yaitu : pertama, melakukan inventarisasi data sesuai dengan jenis data yang telah dijaring melalui instrumen penelitian. Kedua, melakukan klasifikasi data berdasarkan sumbernya dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan PPK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di kecamatan Bolano

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan di Kecamatan Bolano bahwa penulis menemukan peranan PPK di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bolano dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut :

Meningkatkan Akurasi Pemutakhiran Data Pemilih Presiden dan Wakil Presiden

Sebenarnya jaminan hak pilih warga negara Indonesia dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden sangat kuat. Namun demikian masih saja terdapat permasalahan dalam penggunaan hak pilih tersebut. Salah satu masalah utama yang muncul dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli tahun 2014 di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong adalah daftar pemilih yang tidak akurat dalam arti luas.

Daftar Pemilih yang Akurat dalam arti luas di sini dapat dilihat pada tiga aspek, yaitu cakupan (*comprehensiveness*) warga negara berhak memilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih, kemutakhiran Daftar Pemilih (Daftar Pemilih sesuai dengan keadaan mutakhir: misalnya pemilih yang meninggal, pindah, atau tidak lagi berhak memilih tidak lagi tercantum dalam Daftar Pemilih tetapi warga negara yang sudah berhak memilih pada hari pemungutan suara sudah tercantum dalam Daftar Pemilih), dan akurasi dalam arti penulisan nama, tempat dan tanggal, bulan dan tahun lahir (umur), jenis kelamin, dan alamat rumah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Tingkat keakuratan dalam pemutakhiran data pemilih tentunya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ramli salah satu masyarakat yang memiliki hak pilih di Kecamatan Bolano

mengatakan bawah: “Ketika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Tanggal 9 Juli 2014 yang lalu, saya mengalami kesulitan dalam menggunakan hak suara saya oleh karena data pemilih saya tidak sesuai dengan data saya yang sebenarnya dimana data saya yang terdapat pada DPT berada dikecamatan lain sehingga saya tidak dapat menggunakan hak pilih saya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden”

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa pemutakhiran data memang harus valid karena akan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam melaksanakan hak pilihnya oleh karena itu peran PPK selaku Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan memegang peran yang sangat penting karena salah satu bentuk tugas yang disebutkan di dalam Pasal 42 huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah “membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap”. Baik tidaknya pemutakhiran data sangat ditentukan dari kinerja dari PPK selaku panitia Pelaksanaan Pemilihan tingkat Kecamatan dan tentunya akan sangat berkorelasi dengan tingkat partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua PPK Kecamatan Bolano Bapak Darmin pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 mengatakan bahwa : “Disaat menjalankan tugas dan fungsi kami selaku PPK, kami tidaklah harus kaku dengan petunjuk teknis saja, akan tetapi bagaimana trik (*skill*) berdasarkan pengalaman pergaulan di masyarakat kami adopsi untuk melakukan pendekatan persuasif terhadap pemilih kita, kami PPK, PPS, dan KPPS berupaya semaksimal mungkin untuk menyakinkan pemilih kita agar bisa hadir dan turut serta berpartisipasi dalam menyalurkan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara berlangsung, sehingga pencapaian tingkat partisipasi pemilih selalu maksimal dibanding pemilu sebelumnya agar data yang diberikan kepada KPUD betul-betul sesuai dan validasinya dapat di pertanggungjawabkan”

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua KPUD Parigi Moutong Ibu Amelia Idris yang mengatakan bahwa: “Bahwa untuk menunjang keberhasilan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu sangat dibutuhkan peran yang profesional rekan-rekan penyelenggara yang ada dibawah yaitu PPK, PPS dan KPPS. Namun yang lebih berperan itu adalah PPK karena PPK boleh di katakan KPUDnya kecamatan yang secara langsung bisa komunikasi secara intens kepada para responden atau pemilih kita. Jika melihat beban kerja yang diemban oleh PPK cukup besar dan sangat beresiko untuk pencapaian hasil pemilu itu sendiri terlebih disaat pemuktahiran dan penginputan data pemilih bahkan sampai pada tahap rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu yang sangat urgen. Jika penyelenggara di bawah KPUD tidak maksimal

dalam melaksanakan fungsinya sudah sangat pasti KPUD dianggap gagal dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu, karena penyelenggara di bawahlah yang menjadi ujung tombak dalam kegiatan ini”

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahmat selaku Operator SIDALIH KPUD Kabupaten Parigi Moutong mengatakan bahwa: “Dalam hal pemuktahiran dan penginputan data pemilih yang dilakukan oleh KPUD hanyalah sebatas meneruskan kesistem pengaturan *Snap Shod* (SS) dan mentransfer *Soft Copy* ke sistem *PDF*, sebab adanya peran PPK yang melakukan verifikasi secara faktual pada pemuktahiran data dan pemetaan TPS kedalam sistem *SIDALIH* dari awal telah dilakukan oleh tim PPK. Dengan demikian PPK memiliki peran penting sebab jika terjadi kesalahan dalam penginputan data oleh PPK sudah pasti akan salah sampai ke jenjang yang lebih tinggi yaitu KPU.”

Melaksanakan Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses dimanaseorang melakukan internalisasi konsep, nilai-nilai, ide atau gagasan kepada orang lain dalam suatu kelompok atau institusi sosial sehingga memunculkan partisipasi (keikutsertaan) didalam kelompok atau institusi sosial tersebut, dalam konteks ini sosialisasi yang dilakukan oleh PPK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu dengan mengadakan kegiatan Sosialisasi bersama KPUD di Kantor Kecamatan Bolano.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Jemana Suhaerna selaku Devisi Sosialisasi PPK Kecamatan Bolano mengatakan bahwa: “Untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya menyalurkan hak suaranya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka PPK bersama KPUD Kabupaten Parigi Moutong mengatakan sosialisasi di Kantor Kecamatan dengan mengundang masyarakat dari berbagai desa yang ada di kecamatan Bolano, sosialisasi tersebut berisikan pemahaman akan pentingnya penggunaan hak pilih dan tata cara pemilihan”

Dalam pelaksanaannya, PPK adalah “ujung tombak” yang menentukan baik atau buruknya pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Apa yang disampaikan di atas ini, merupakan gambaran bahwa PPK memiliki tanggung jawab yang besar dalam tiap penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kenyataannya, dalam penyelenggaraannya masih ditemukan berbagai persoalan salah satunya yang sangat krusial adalah terkait tingkat Partisipasi Masyarakat, sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam latar belakang di atas bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Bolano terdapat jumlah DPT 11.369 orang, pengguna hak pilih sebanyak 8.379 orang, dengan demikian yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 2.990 orang atau

dengan rumus $(DPT/11.369 - \text{Pengguna Hak Pilih}/8.379 = 2.990 \text{ Golput})$, jumlah angka golput ini meningkat jika dibandingkan pada pemilu legislatif tahun 2014 yang mana jumlah DPT sebanyak 11.295 orang sementara jumlah pengguna hak pilih sebanyak 8.570 orang, dengan demikian jumlah angka golput saat itu sebanyak 2.725 orang.

Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di kecamatan Bolano

Demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden PPK harus memastikan semua masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tetap di Kecamatan Bolana dapat memberikan hak suaranya. Namun faktanya ketika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

Rendahnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Pemilu

Khusus untuk di kecamatan Bolano kabupaten Parigi Moutong tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil Presiden pada tahun 2014 masih sangat minim. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 dikarenakan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan Pemilu, masyarakat menganggap bahwa memilih adalah sebuah hak dan bukan kewajiban. Karena memilih bukan sebuah hak maka bisa digunakan dan bisa juga tidak digunakan karena tidak ada konsekuensi hukum dan moral politik bagi mereka yang tidak memilih.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas terlihat bahwa masyarakat cenderung melihat pemilu sangatlah pragmatis, artinya efek dan pengaruh pemilu haruslah dapat dirasakan dapat memberikan perubahan kepada kehidupan masyarakat. Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ismail salah satu warga yang masuk DPT pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 bahwa : “saya tidak ikut untuk mencoblos pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, karena pekerjaan saya di Kebun sangat banyak, kalau saya datang untuk mencoblos maka saya sangat rugi karena jika saya ikut mencoblos saya tidak dapat uang sedangkan jika saya tetap bekerja di kebun saya dapat pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga di rumah”

Tidak mudah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan pemahaman politik, butuh perjuangan agar pola pikir (*mindset*) tersebut bisa berubah sehingga masyarakat peduli pemilu dan mengerti apa yang menjadi hak dan apa pula yang menjadi kewajibannya, dengan demikian sangat dibutuhkan kerja ekstra yang maksimal dari lembaga PPK, PPS

maupun KPUD sebagai penanggungjawab pelaksanaan pemilu di tingkat Kabupaten yang dapat mencerminkan penyelenggara yang selalu taat akan asas.

Kurangnya Anggaran

Anggaran merupakan hal yang sangat urgen dalam pelaksanaan pemilu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden semakin besar anggaran maka semakin baik pelaksanaan pemilu tersebut, faktanya yang terjadi di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong anggota PPK yang membantu KPUD dalam melakukan pemutakhiran data hanya diberikan honor yang sangat minim yakni sebesar Rp. 800.000 per bulan yang kemudian harus mempersiapkan seluruh data sebelum pelaksanaan, penyediaan data pada pelaksanaan pemungutan suara, serta menginventarisir hasil pemungutan suara seharusnya honor yang sesuai adalah sebesar 2.000.000.

Hasil Wawancara dengan anggota PPK di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Bapak Rusli bahwa : “Terus terang dalam melakukan verifikasi DPT honor buat kita, itu sangat minim. Padahal kita harus menyesuaikan data masyarakat agar DPT nanti yang dikeluarkan oleh KPUD tidak mengalami kesalahan, kami sebagai ujung tombak pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden seharusnya memperoleh honor yang sesuai, karena jika data yang kami berikan mengalami kesalahan tentunya akan sangat mempengaruhi DPT yang nantinya dikeluarkan oleh KPUD jika hal itu terjadi maka tentunya akan sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat”

Anggaran yang diberikan saat ini merupakan anggaran yang telah ditentukan pada tingkat pusat. Dengan demikian anggaran yang diterima oleh anggota PPK adalah sama baik di wilayah Pulau Jawa maupun di Provinsi Papua atau Kalimantan yang kondisi geografisnya berbeda dengan Pulau Jawa. Hal ini tentunya mengakibatkan kecenderungan Pemutakhiran Data dilakukan dengan seadanya dan tentunya mengurangi keakuratan “Data Pemilih”. Demikian halnya ketika Penyelenggara pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 menginginkan Data Pemilih yang akurat maka alokasi anggaran yang harus dikeluarkan akan menjadi lebih besar.

Kurangnya pendidikan politik pada masyarakat

Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga pelaksanaan pemilu untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden juga tidak berpengaruh bagi mereka, padahal pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sangat penting untuk kepemimpinan bangsa 5 tahun kedepan, kita bisa bayangkan kalau bangsa ini di pimpin oleh pemimpin yang otoriter dan tidak merakyat maka dapat dibayangkan apa jadinya bangsa ini

kedepan, maka dari itu perlunya pendidikan politik bagi masyarakat tidak hanya sekedar sosialisasi yang hanya memuat teknis dan tata cara penyaluran hak suara tetapi lebih dari itu pendidikan politik memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya suara yang mereka milik untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasmat Tokoh Pemuda di Kecamatan Bolano mengatakan bahwa : “Khusus untuk kami di kecamatan Bolano tidak pernah diberikan pendidikan politik, kami hanya diberikan sosialisasi dan pemahaman tentang tata cara pencoblosan yang baik dan benar dan menyampaikan tentang para kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh KPUD dan PPK di kecamatan Bolano, padahal kami juga mengharapkan ada pemahaman yang diberikan terkait pentingnya politik sehingga masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Bolano terhindar dari namanya janji-janji kampanye dari tim pemenang pasangan calon”

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas, penulis berkesimpulan bahwa pendidikan politik memang mutlak harus diberikan kepada masyarakat agar masyarakat juga dapat memahami tentang perkembangan politik di tanah air disamping itu masyarakat dapat lebih aktif dalam pesta politik termasuk pemilu Presiden dan wakil Presiden, namun memang ketika pemilu 2014 yang lalu pendidikan politik kepada masyarakat ini tidak berjalan atau bahkan tidak dilakukan oleh institusi-institusi terkait, sehingga tidak heran jika partisipasi masyarakat dalam pemilu presiden dan wakil presiden banyak yang golput atau tidak menyalurkan hak suaranya.

Fanatisme Terhadap Vigur Calon Presiden

Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama beberapa masyarakat di kecamatan Bolano dengan yang tidak menggunakan hak suaranya pada pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2014 di antaranya : 1). Bapak Sukri masyarakat Desa Bolano Barat mengatakan: “Pada pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2014 saya tidak menggunakan hak suara saya karena saya tidak menyukai kedua kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden saya menyukai bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono karena menurut saya beliau telah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT)” 2). Ibu Novi Desa Wanamukti mengatakan : “Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 saya tidak datang memilih karena tidak ada program mereka seperti yang dilakukan oleh Bapak Susilo Bambang Yudoyono saat dia menjabat sebagai presiden, karena program itu sudah kami rasakan selama 10 tahun kepemimpinannya”

Jauhnya TPS

Salah satu faktor yang menyebabkan sejumlah orang mengurungkan niat untuk mengikuti pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 karena jarak antara lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan tempat berdomisili kelompok pemilih sangat berjauhan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di antaranya: 1). Bapak Mansyur Desa Wanamukti Utara mengatakan yang bahwa “Jarak tempuh rumah saya dengan TPS sangat jauh kurang lebih 3 Kilometer walaupun saya harus pergi maka saya harus naik ojek atau minta diantarkan tetangga karena saya tidak memiliki kendaraan, sehingga saya tidak melakukan pencoblosan, padahal saya ingin sekali mencoblos calon presiden dan wakil presiden”. 2). Bapak Toha Warga Desa Lembah Bomban mengatakan bahwa: “saya seorang petani petani yang tinggal di kebun, salah satu di antara sekian orang tidak memilih pada saat pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014, dikarenakan letak TPS dengan kebun saya sekitar 5 Km saya ingin sekali memilih tetapi saya tidak ada kendaraan yang bisa saya tumpangi menuju TPS, kalau saya harus berjalan kaki waktu tempuh saya selama 3 jam pulang pergi, sementara saya tidak bisa meninggalkan kebun saya lewat dari 1 jam karena saya harus jaga binatang pengganggu tanaman di kebunku, dapat dibayangkan kerugianku jika waktu harus tersita”

Hal ini menjadi kendala tersendiri sehingga jika dimungkinkan penempatan lokasi TPS dapat disesuaikan dengan tempat berdomisili Kelompok penyebaran masyarakat, agar tidak menjadi hambatan bagi pemilih dalam mengakses tempat pemungutan suara, atau setidaknya memprioritaskan pemilih yang bermukim di daerah yang cukup jauh dari TPS dan memberikan kesempatan pertama bagi pemilih yang berstatus demikian sehingga dapat menarik minat masyarakat kita untuk dapat menyalurkan hak pilihnya, dan akan berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat memilih pada pemilu yang akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut Dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014, PPK memiliki peran penting sebagai ujung tombak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan karena PPK bersentuhan langsung dengan masyarakat, dalam praktiknya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, PPK memiliki peran yaitu meningkatkan akurasi pemutakhiran data pemilih presiden dan wakil presiden baik secara manual maupun menggunakan *SIDALIH* yang menggunakan internet

serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong. Ketika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pemilu, kurangnya anggaran, kurangnya edukasi politik kepada masyarakat, fanatisme terhadap vigur calon presiden serta jauhnya jarak Tempat pemungutan suara (TPS).

Saran yang direkomendasikan peneliti Sebaiknya PPK memberikan pemahaman lebih mendalam kepada seluruh masyarakat dan perangkat penyelenggara di tingkat Desa tentang regulasi dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Sebaiknya pemerintah dalam hal ini KPU dan PPK melakukan usaha sungguh-sungguh dan sistematis dengan jalan meningkatkan kepedulian politik masyarakat, dan paling tidak KPU dapat membentuk relawan demokrasi yang fungsinya secara khusus melakukan sosialisasi sehingga masyarakat memiliki kepedulian serta tidak memunculkan sikap apatis terhadap proses-proses politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Djiwandono Soedjati, J dan T.A Legowa. 1986. *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*. CSIS : Jakarta. 1986.
- Kusnardi, Moh., dan Ibrahim, Harmaly. 2005. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: PS HTN UI dan Sinar Bakti, cetakan kelima.
- Mariana, Dede. 2009. *Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia : Bandung.
- Mufti, Muslim., dan Naafisah, Didah Durrotun. 2013. *Teori-Teori Demokrasi*. CV Pustaka Setia : Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan